

# PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sutan Syahrir No. 178 Padang Panjang Telp. (0752) 82200 Fax. (0752) 82200

Email: kominfo.pdgpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjang.go.id

# KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR: 061/34/SETDAKO-PP/2019

### TENTANG

# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018-2023

# WALIKOTA PADANG PANJANG,

### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

Lembar Kedua

Keputusan Walikota Padang Panjang

Nomor

: 061/34 / SETDAKO-PP/2019

Tanggal:

9 Mei

2019

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;

- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Non or 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
- 13. Peraturan Daeiah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Dae ah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018-2023;
- 15. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018-2023.

KESATU

Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini. Lembar Kedua

: Keputusan Walikota Padang Panjang

Nomor : 061/39 / SETDAKO-PP/2019

Tanggal: o mei 2019

KEDUA

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal Padang Panjang 2019

a.n. WALIKOTA PADANG PANJANG Pj.SEKRETARIS DAERAH,

MARTONI, S.Sos. M.Si
Pembina Tk. I /NIP 19730304 199308 1 001

embusan keputusan ini disampaika kepada Yth;

- 1. Walikota Padang Panjang (Sebagai laporan);
- 2. Inspektur Kota Padang Panjang

Lampiran

: Keputusan Walikota Padang Panjang

Nomor : 061/

/Setdako-PP/2019

Tanggal Tentang

: Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

# ATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2013-2018

Г		Γ	Γ		-		T		-	-		-		 Γ		-	-					_		
	renanggung Jawab	7	Bagian organisasi	Bagian Pemerintah			Bagian Pemerintahan	o it change		-		-		Bagian Organisasi					******************************	Ot .			1	
	Sumber Data	9			· ·		Seluruh OPD yang	ada dilingkungan	Pemerintah Daerah	10.7°				OPD Terkait			, a	***************************************			*******	-		
Sasaran Misi	Formulasi	5	1/3 dari jumlah OPD menadapat	nilai baik=B, 1/2dari jumlah OPD	menadapat nilai B=BB,seluruh OPD	nilai A=A	Penilaian dilaksanakan secara	berjenjang mulai dari penilaian	Propinsi dan dilanjutkan dengan	penilaian oleh Kementerian Dalam	negeri terhadap kelengkapan	Laporan Penyelenggaraan	Pemerintah Daerah	Pelayanan dasar dalam standar	pelayanan minimal sesusai	kementrian masing-masing					. 3			
	Alasan	4	Sudah jelas		77 X		Sudah jelas				,			Standar Pelayanan Minimal,	yang selanjutnya disingkat	SPM adalah ketentuan	mengenai Jenis dan Mutu	Pelayanan Dasar yang	merupakan Urusan	Pemerintahan Wajib yang	berhak diperoleh setiap	Warga Negara secara	minimal	
Indikator (Itama (IKLI)	mainator otarina (mo)	3	Nilai SAKIP				Nilai LKPPD						,	Standar pelayanan	minimal									
			ı				7							3										
Sacaran	13 1555	2	1 Meningkatkan	akuntabilitas kinerja	pemerintah Daerah					- Control				1 Meningkatnya	pelayanan publik									
Tuinan	linefe.	1	ngkatnya kinerja	lenggaraan	rintah	1 -					ot animay-			enggaranya	nan publik yang	alitas &melayani		,	-					

. 1	c		WIND COMPANY OF THE PARTY OF TH		Sasaran Misi		deutel parinhacaod
ıujuan	Sasaran		Indikator Utama (INU)	Alasan	Formulasi	Sumber Data	renanggung Jawan
ngkatnya	1 Meningkatnya	4	persentase aktivitas	Sudah jelas	Jumlah lembaga keagamaan yang	Lembaga Keagamaan	Lembaga Keagamaan Bagian Kesejahteraan
tas keaagamaan	aktivitas		kegiatan keagamaan di		aktif berbanding jumlah lembaga		Rakyat
oudaya di	keaagamaan adat		mesjid		keagamaan yang ada X 100		
arakat	budaya di						
	masyarakat						
ngkatkan kualitas	1 Meningkarkar.	2	Persentase	Sudah jelas	Jumlah kebijakan umum sektor	OPD Terkait	Bagian Perekonomian
elenggaraan	kualitas		terselenggaranya		perekonomian yang terselenggara		
kan sektor	Penyelenggaraan		kebijakan umum sektor		dibagi dengan jumlah kebijakan		
onomian dan	kebijakan sektor		perekonomian Kota		Umum sekto r perekonomian yang	-	
angunan Daerah	Perekonomian		Padang Panjang		ada kaii 100		
	1						
	2 Meningkatnya	9	Rata-rata persentase	Perpres no. 16 Tahun 2018	Total kegiatan yang dilaksanakan	Laporan realisasi	Bagian Pengadaan
	pencapaian		pencapaian kegiatan	tentang Pengadaan	berbanding total kegiatan x 100	bulanan seluruh OPD Barang/Jasa dan	Barang/Jasa dan
06	pembangunan		Pernbangunan	Barang/Jasa Pemerintah			Pengendalian
	Daerah						Pembangunan

a.n. WALIKOTA PADANG PANJANG Pj. SEKRETARIS DAERAH

MARTONI, 5.50s, M.Si Pembina Tk. I/ NIP. 19730304 199308 1 001